

Ekonomi Hijau: Pendekatan Sosial, Kultural, dan Teknologi*

Sudarsono Soedomo[†]

14 Juli 2010

1 Pendahuluan

Ketika saya membaca topik yang harus saya bahas “Green Economy: Social, Cultural, and Technological Approach” maka reaksi pertama yang muncul dalam diri saya adalah kebingungan. Judul di atas merupakan terjemahan mentah dari topik dalam bahasa Inggris yang dibebankan kepada saya tersebut. Untuk dapat membahas topik ini, maka kita perlu mengerti lebih dahulu apa yang dimaksud dengan green economy. Pendekatan sosial, kultural, dan teknologi merupakan wahana untuk menghampiri green economy tadi. Dua buku pertama yang saya buka adalah “Green Economics” oleh Cato (2009) dan “Green Development” oleh Adams (2009). Meskipun banyak ciri surgawi dari green economy yang disajikan, tetapi definisi green economy itu sendiri tidak dinyatakan secara eksplisit dalam kedua buku tersebut.

Ekonomi tidak akan pernah ada tanpa sumberdaya alam dan lingkungan. Setiap aktivitas ekonomi pastilah bersentuhan dengan salah satu atau bahkan keduanya sekaligus. Sayangnya, dalam perkembangannya kajian ekonomi pernah mengabaikan sumberdaya alam, terlebih-lebih setelah pesimisme Malthus dan the Club of Rome tidak kunjung terbukti dan penduduk dunia semakin meledak. Ekonomi neoklasik “merasa” telah mampu mengatasi kelangkaan sumberdaya alam dengan kemajuan teknologi yang terus menerus (Stiglitz, 1974; Agnani et al., 2005). Tetapi suka atau tidak, sistem ekonomi tidak akan pernah mampu keluar dari ekosistem. Aturan yang mengatur dinamika ekosistem, dimana di dalamnya aktivitas manusia berlangsung, pada akhirnya merupakan fungsi dari hukum biologi, bukan fungsi dari sistem ekonomi yang diciptakan manusia (Gowdy and McDaniel, 1995; Smith, 1996).

Tulisan bertujuan untuk membuka diskusi yang lebih serius tentang ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Dialog yang lebih serius dan inten antar disiplin, khususnya ilmu ekonomi mainstream dan disiplin lainnya sangat diperlukan. Bahasa ekonomi sering sulit dimengerti oleh pejuang lingkungan, sementara bahasa lingkungan sulit dipahami oleh pembuat kebijakan ekonomi. Tulisan ini diorganisasi sebagai berikut. Seksi 2 menyampaikan sepenggal peradaban yang pernah terjadi di Pulau Jawa sebagai wahana introspeksi. Seksi 3 mendiskusikan perkembangan pandangan terhadap pembangunan dan faktor-faktor yang berperan penting, serta diakhiri dengan pembahasan ekonomi hijau. Seksi 4 mendiskusikan lebih lanjut kapi-

* Disampaikan pada Diskusi “KONSEP EKONOMI HIJAU/PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN UNTUK INDONESIA”, di Kantor BAPPENAS, JAKARTA, 14 Juli 2010.

[†]Institut Pertanian Bogor

tal sosial, kultur, dan pembangunan yang telah disinggung pada subseksi 3.2. Seksi 5 menyampaikan beberapa kasus aktual untuk memicu keseriusan kita dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Seksi 6 merupakan seksi terpendek sebagai penutup.

2 Peringatan dari Masa Lalu

Jika ketika Candi Borobudur dibangun diasumsikan bahwa pendapatan per kapita masyarakat di Pulau Jawa khususnya dan Nusantara Umumnya setara dengan 5 US\$ per tahun dan pendapatan tersebut tumbuh dengan laju satu persen per tahun, maka pendapatan masyarakat tersebut hari ini seharusnya adalah 530.552 US\$ (lima ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh dua dolar Amerika Serikat).¹ Kenyataannya, hari ini pendapatan per kapita rakyat Indonesia baru mencapai kurang dari 5.000 US\$. Apa saja yang telah terjadi dalam rentang waktu tersebut? Apakah ada ketidakberlanjutan dalam perjalanan bangsa Indonesia? Mau menjadi seperti apa bangsa Indonesia 1.000 tahun dari sekarang? Tetap berpendapatan per kapita kurang dari 5.000 US\$ bukan sesuatu yang tidak mungkin. Sejarah kerap kali berulang!

Dalam rentang waktu 1.163 tahun tersebut banyak terjadi perubahan sosial, bahkan kultural. Candi Borobudur merupakan tanda pengaruh Buda. Beberapa kerajaan yang muncul setelah itu menunjukkan ciri pengaruh Hindu hingga mencapai puncak kejayaannya yang berpusat di Majapahit. Perentangan bahkan hingga melibatkan peperangan antar kerajaan kerap terjadi. Gelombang perubahan sosial berikutnya adalah munculnya pengaruh Islam yang bertahan hingga hari ini. Pengaruh bangsa Eropa, khususnya Belanda, terjadi antara tahun 1600 hingga 1950. Perubahan penting yang terjadi selama pergolakan tersebut adalah perubahan orientasi dari bangsa maritim menjadi bangsa kontinental. Sejarah bangsa Nusantara sebagai bangsa penjelajah lautan terputus. Ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan seakan tidak tersisa sama sekali. Benarkah demikian?

Ketika tahun 1966 pembangunan ekonomi mulai dilaksanakan dengan lebih terencana, bangsa Indonesia seolah merupakan bangsa yang baru lahir di dunia, atau bangsa yang baru didatangkan dari planet lain, atau bangsa yang baru bangun dari tidur sangat panjang. Semua ilmu pengetahuan dan teknologi pembangunan harus didatangkan dari luar. Dihadapkan segala sesuatu yang didatangkan dari luar tersebut, seolah segala sesuatu yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi kelihatan sangat buruk dan harus ditinggalkan. Kita sering melupakan atau menganggap remeh bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi hanyalah ketrampilan semata. Di balik setiap ilmu pengetahuan dan teknologi sebenarnya ada "ruh" yang belum tentu cocok dengan "ruh" bangsa Indonesia. Jargon indah yang mengiringinya adalah bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah bebas nilai.

3 Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan

3.1 Pembangunan Neoklasik

Ada kaitan yang erat antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dan kaitan tersebut sering menimbulkan kebingungan (Sen, 1988). Oleh karena itu, bukanlah hal yang mengejutkan bila karya tulis awal dalam ilmu ekonomi pembangunan para penulis memberi per-

¹Menurut salah satu catatan, Candi Borobudur selesai dibangun pada tahun 847 Masehi

hatian yang sangat inten pada cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam meningkatkan produk nasional bruto (GNP) atau produk domestik bruto (GDP) dan total penyerapan tenaga kerja. Perbedaan antara keduanya dapat diringkas menjadi bahwa pembangunan ekonomi “tidak harus bermakna” mengejar pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan dapat saja merupakan keharusan tetapi tidak cukup. Informasi GNP atau GDP hanya menangkap barang dan jasa yang ada pasarnya, sedangkan banyak barang dan jasa yang sangat menentukan kesejahteraan manusia tidak terdaftar di pasar. Pembangunan berkepentingan dengan pemerataan dan perubahan struktur yang tidak mungkin teratasi hanya dengan memanipulasi pertumbuhan (Nafziger, 2006).

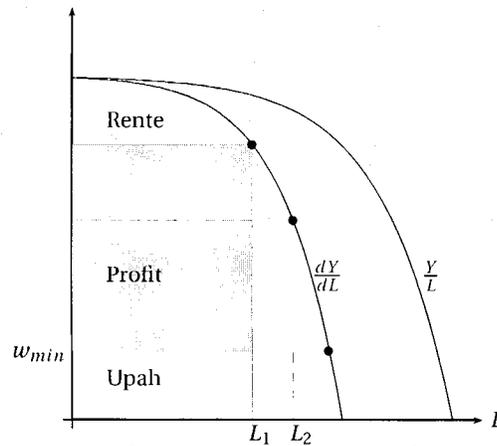
Ketika pesimisme Malthus dan the Club of Rome tidak terbukti, penganut neoklasik mendapatkan landasan yang kuat untuk semakin hanyut dengan pahamnya. Dalam ekonomi klasik dengan bintangnya Adam Smith dan Ricardo, akumulasi kapital merupakan faktor penentu yang mempengaruhi laju kemajuan ekonomi. Sumberdaya alam utama yang menjadi fokus ekonomi klasik adalah tanah pertanian. Dalam pandangan ekonomi klasik, pertanian sendiri mampu menciptakan surplus. Dalam karya besarnya “the wealth of nations,” Adam Smith mengembangkan teori harga normal ditentukan oleh harga buruh, kapital, dan tanah. Dengan menggunakan notasi Y untuk produk netto, L untuk input buruh, K untuk kapital, dan R untuk tanah, fungsi agregat produksi Smith berbentuk $Y = F(L, K, R)$.

David Ricardo mengembangkan lebih lanjut teori harga normal di atas dengan memperkenalkan pengertian perbedaan rente atas tanah berkualitas lebih tinggi sementara tanah marginal memiliki rente nol. Jika dalam fungsi produksi agregat Smith kualitas tanah dianggap konstan, dalam fungsi produksi agregat Ricardo kualitas tanah, $q(R)$, dianggap beragam yang berbanding terbalik dengan jumlah lahan yang telah dalam pemakaian. Fungsi produksi agregat Ricardo mengambil bentuk $Y = F(L, K, q(R)R)$ dengan $\frac{\partial q}{\partial R} < 0$.

Dalam perjalanan pertumbuhan ekonomi, budidaya pertanian semakin melibatkan tanah yang kurang produktif hingga akhirnya mencapai tanah marginal. Karena tanah marginal tidak memerlukan rente apapun, harga alami dari suatu komoditi yang dihasilkan oleh tanah marginal tersebut tidak mencakup komponen rente. Rente Ricardo dan teori pertumbuhan dapat dijelaskan dengan menggunakan Gambar 1. Produktivitas marginal dari buruh ($\frac{\partial Y}{\partial L}$) menentukan profit dan rente. Ketika populasi adalah L_1 dan buruh diupah dengan upah minimum w_{min} , pemilik tanah mendapatkan rente, sedangkan kapitalis menerima profit. Seiring dengan semakin luasnya tanah kurang produktif yang digunakan, semakin tinggi populasi maka semakin tinggi pula rente atas tanah berkualitas tinggi dan semakin kecil profit yang diperoleh. Karena tanah marginal tidak memberikan hasil bersih apapun maka menjadi wajar bila tanah marginal tidak memiliki harga dan kemudian lenyap dari fungsi produksi agregat neoklasik.

Pandangan di atas masih tetap menjadi tema utama ekonomi neoklasik dalam menganalisis sumber pertumbuhan ekonomi. Harrod (1939) dan Domar (1946) menyatakan bahwa investasi dengan cepat mendorong income agregat dan pada saat yang sama memperbesar output potensial periode selanjutnya. Solow (1956) melihat kemungkinan meningkatnya standard hidup material melalui kemajuan teknologi. Fungsi produksi mencakup tenaga kerja (L), kapital (K), dan perubahan teknologi (A) dengan bentuk $F(L, K, A)$. Sumberdaya alam atau lingkungan tidak ada dalam fungsi produksi neoklasik.

Terbitnya buku “limits to growth” dari Club of Rome di awal tahun 1970an telah menggeser



Gambar 1: Teori Rente Ricardo

perdebatan atas masa depan pertumbuhan ekonomi. Para penulis limits to growth menyatakan adanya batas biofisik bagi pertumbuhan yang akan membawa pertumbuhan ekonomi kepada titik akhir. Sayangnya, perlakuan terhadap preferensi, teknologi produksi, dan ekonomi terlihat tidak konvensional dan tidak masuk akal bagi banyak ekonom (Beckmann, 1975).

Terhadap limits to growth tersebut muncullah gerakan lingkungan. Ahli pertumbuhan mulai memasukkan sumberdaya alam dan polusi ke dalam model pertumbuhan ekonomi selama era 1970an. Sebagai contoh, Stiglitz (1974) mengusulkan fungsi produksi agregat dengan tenaga kerja, barang modal, dan sumberdaya alam sebagai barang substitusi dalam produksi. Fungsi produksi yang digunakan Stiglitz adalah $F(N, K, R)$ dimana R adalah laju pemakaian sumberdaya alam. Namun upaya Stiglitz tersebut tidak menjadikan sumberdaya alam dan lingkungan dengan serta merta memasuki arus utama kajian pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Setelah membandingkan income per kapita dan intensitas kapital antara Amerika Serikat dan India, Lucas Jr. (1990) menyimpulkan bahwa intensitas kapital saja tidak cukup memadai untuk menjelaskan perbedaan income per kapita yang begitu jauh. Kualitas sumberdaya manusia diduga sebagai penyebab perbedaan yang begitu jauh. Namun, setelah melakukan koreksi terhadap sumberdaya manusia, perbedaan memang semakin kecil tetapi tetap tidak hilang. Model dengan akumulasi kapital fisik dan kapital manusia yang digunakan oleh Mankiw et al. (1992) dapat menjelaskan data dengan baik. Barro (2001) juga menguatkan peran dari sumberdaya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi.

3.2 Pembangunan Berkelanjutan

Satu wajah menarik dari model pertumbuhan modern permulaan adalah pengabaian fondasi alami dari produksi. Kapital dan tenaga manusia bergabung menghasilkan output komoditas, tetapi tidak perlu lahan sebagai tempat, tidak perlu bahan untuk menghasilkan komoditas, dan tidak perlu energi untuk menggerakkan proses produksi dan perdagangan komoditas (England, 2000). Dengan mengandalkan pada kemajuan teknologi dan substitusibilitas antar kapital, ekonomi neoklasik sangat yakin dengan keberkelanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Kritik terhadap model neoklasik datang dari berbagai penjurur dan disiplin. Penjelasan bagi pertumbuhan ekonomi harus meliputi kultur bangsa (Landes, 1999; Inglehart and Baker, 2000). Kultur biasanya dipandang berpengaruh terhadap kinerja ekonomi dengan mempengaruhi ciri personal seperti kejujuran dan etika kerja. Agama merupakan salah satu dimensi penting dari kultur. Studi pertama tentang hal ini dilakukan oleh Weber yang melihat hubungan Etika Protestant dengan spirit kapitalisme. Studi lebih baru oleh Barro and McCleary (2003) menyimpulkan bahwa kepercayaan agama mempengaruhi ciri individu yang meningkatkan kinerja ekonomi. Pentingnya faktor kultur bagi pertumbuhan ekonomi juga diamati oleh (Abrams and Lewis, 1995).

Ketika ekonomi Jepang, Cina, dan Korea Selatan berkembang semakin berkilau, orang mulai melihat pengaruh faktor konfusianisme. Bukan mustahil suatu saat nanti Hinduisme akan dikaitkan dengan kemajuan ekonomi pada saat India dan Sri Langka berhasil menyejahterakan rakyatnya. Setelah meneliti efek keragaman kultural pada pembangunan di 98 negara selama periode 1960-1985, Lian and Oneal (1997) sampai pada kesimpulan bahwa perbedaan etnik, bahasa, dan agama tidak berhubungan nyata dengan laju pertumbuhan GDP per kapita.

Namun, kritik yang terus menerus dan relatif paling bertahan lama dan sistematis datang dari para pecinta lingkungan. Dari kelompok ini muncul brown GDP dan green GDP. Bagi saya, GDP adalah GDP dan brown GDP adalah GDP yang salah hitung. Kita mulai diskusi ini dengan mengangkat definisi tentang pembangunan berkelanjutan.

Dalam UU 32 tahun 2009, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai “upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan” (Pasal 1 ayat (3)). Definisi ini masih senafas dengan definisi umum tentang pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhinya sendiri. Selanjutnya dikenal keberkelanjutan versi lemah dan versi kuat sebagai berikut:

1. Keberkelanjutan lemah: Jika pembangunan tidak mengalami penurunan dari generasi ke generasi. Substitusibilitas antara kapital alam dan kapital buatan dianggap dapat berlangsung sempurna. Saat ini, penafsiran keberlanjutan lemah ini merupakan penafsiran keberlanjutan yang dominan.
2. Keberkelanjutan kuat: Substitusibilitas antara kapital alam dan kapital buatan adalah terbatas. Kedua kapital dipandang sebagai komplemen – keduanya harus digunakan bersama agar produktif. Pendekatan keberlanjutan kuat berimplikasi pada batas skala ekonomi makro. Sistem ekonomi tidak dapat tumbuh di luar batas yang ditetapkan oleh kapasitas regenerasi dan penyerapan limbah oleh ekosistem.

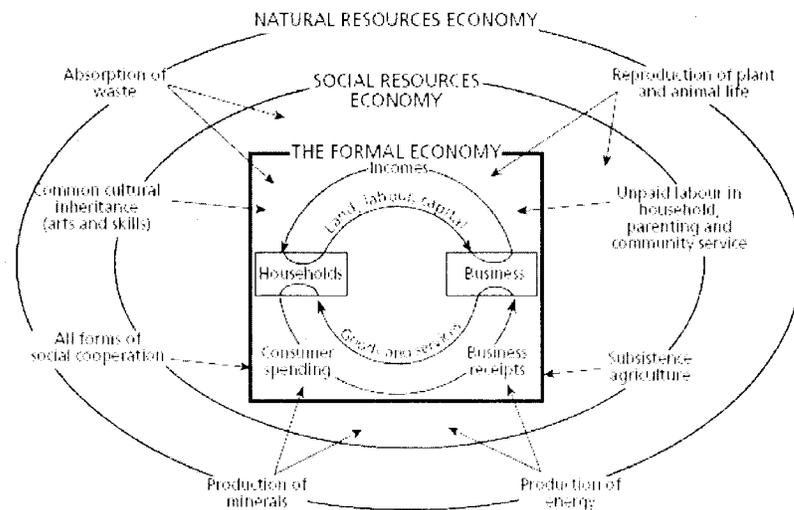
Selanjutnya, Costanza dan Daly mengusulkan “syarat keharusan minimum” yang dinyatakan dalam konservasi kapital alam (Daly, 1991) sebagai berikut:

1. Sumberdaya alam dapat pulih: kaidahnya adalah membatasi konsumsi sumberdaya hingga level hasil lestari.
2. Sumberdaya alam tidak dapat pulih: kaidahnya adalah menginvestasikan kembali hasil dari eksploitasi sumberdaya alam tidak dapat pulih kedalam pengganti yang dapat pulih.

3.3 Ekonomi Hijau

UU 32 tahun 2009 tidak memberi definisi tentang ekonomi lingkungan hidup yang hendak diwujudkan itu seperti apa. Tanpa mendefinisikan apa yang hendak dicapainya, UU 32 tahun 2009 memberikan instrumen untuk mencapai apa yang belum jelas tersebut. Instrumen ekonomi lingkungan hidup hanya menyebut isu "pelestarian fungsi lingkungan hidup." Bagaimana dengan isu pemerataan dan keadilan?

Sebelum membahas lebih jauh ekonomi hijau dan ilmu ekonomi hijau, Gambar 2 memperlihatkan cara pandang pendukung ekonomi hijau. Ekonomi formal - biasa kita pelajari dalam ilmu ekonomi mainstream - tertanam didalam suatu sistem struktur sosial dan hanya merupakan bagian sangat kecil dari aktivitas ekonomi. Ekonomi formal ini mengabaikan tatanan sosial dan lingkungan tempat berlangsungnya pertukaran antara rumah tangga dan bisnis berlangsung. Tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai transaksi ekonomi terjadi dalam hubungan sosial, dan transaksi tersebut terkandung dalam planet yang merupakan sistem tertutup.



Gambar 2: Perluasan Perhitungan Ekonomi Keluar Batas Siklus Ekonomi Konvensional (Cato (2009) yang mengutip dari E Hutchinson, M. Mellor dan W. Olsen)

Sebelum menginjak kepada ekonomi hijau ada baiknya melihat karakteristik ilmu ekonomi hijau yang barangkali dapat membantu imaginasi kita tentang ekonomi hijau yang dipelajarinya. Berikut ini adalah kutipan pendapat Cato (2009) tentang beberapa hal yang membedakan ilmu ekonomi hijau dari ilmu ekonomi konvensional:

1. Ilmu ekonomi hijau secara inheren peduli dengan keadilan sosial. Bagi ekonomi mainstream, welfare economics hanyalah tambahan, bagian kecil yang sedikit sekali disinggung. Bagi seorang ekonom hijau, pemerataan dan keadilan merupakan jantung yang diberi perhatian melebihi perhatian terhadap efisiensi.

2. Ilmu ekonomi hijau tumbuh dari pecinta lingkungan dan politisi hijau karena kepentingan mereka atas hal tersebut. Ilmu ekonomi hijau tumbuh dari bawah ke atas dan dari mereka yang membangun ekonomi berkelanjutan dalam praktek ketimbang dari teori abstraks.
3. Ilmu ekonomi hijau bukanlah, hingga kini, suatu disiplin akademik dengan mayor di universitas. Disini Cato menyatakan bahwa universitas itu sendiri telah terperangkap dalam sistem ekonomi yang mengglobal. Kurikulum yang ditawarkanpun adalah kurikulum yang mendukung ekonomi yang mengglobal tersebut.
4. Ilmu ekonomi hijau menuntut pengertian yang lebih kaya dan dalam tentang manusia, hubungan mereka, dan bagaimana mereka bertindak dan termotivasi. Kebutuhan yang diperhatikan bukan sekedar kebutuhan fisik tetapi juga kebutuhan psikologis dan spiritual.
5. Ilmu ekonomi hijau memperlebar lingkaran kepeduliannya melampaui spesies manusia demi memperhatikan sistem planet Bumi secara keseluruhan dengan semua ekologi dan spesies yang beragam.
6. Ilmu ekonomi konvensional berfokus nyaris melulu pada kuantitas, sementara penganut ilmu ekonomi hijau lebih peduli dengan kualitas kehidupan manusia.

Sekarang giliran tentang green economy, bukan apa definisinya melainkan apa ciri-cirinya. Sekali lagi saya mengambil dari Cato (2009):

1. Suatu ekonomi hijau merupakan ekonomi berbasis lokal.
2. Dalam ekonomi hijau, orang-orang akan berhubungan satu dengan yang lain lebih dahulu dan baru kemudian berdagang. Pasar dipandang sebagai tempat bersosialisasi dan persahabatan yang menyenangkan dimana berita dan pandangan politik dipertukarkan seperti halnya barang dan uang. Seperti inilah fungsi Pasar Minggu, Pasar Senin, Pasar Rebo dan seterusnya tempo dulu.
3. Suatu ekonomi hijau sangat mungkin melibatkan distribusi aset menggunakan harta warisan yang ditingkatkan dan pajak capital gain.
4. Dalam suatu ekonomi hijau, pajak kemungkinan juga digunakan secara strategis untuk mempengaruhi kekuasaan dan perilaku bisnis. Dominasi neoliberal dari pembuatan keputusan mengakibatkan penggeseran pajak dari korporasi ke pendapatan dari penduduk swasta.
5. Suatu ekonomi hijau akan dipandu oleh nilai keberlanjutan ketimbang oleh nilai uang.
6. Suatu ekonomi hijau akan menanggalkan kecanduan pada pertumbuhan ekonomi dan menjadi ekonomi steady-state.
7. Suatu ekonomi hijau akan menjadi ekonomi yang ramah dimana hubungan dan komunitas menjadi pengganti konsumsi dan teknologi.
8. Suatu ekonomi hijau memberi peran lebih luas bagi ekonomi informal dan sistem koperasi dan berbasis komunitas yang saling mendukung.

9. Dalam ekonomi hijau, sistem kesehatan akan berfokus pada pengembangan kesehatan yang baik dan penyediaan perawatan primer, berbasis lokal, ketimbang obat berteknologi tinggi dan perusahaan farmasi yang merambah kemana-mana.
10. Ekonomi hijau akan menggantikan bahan bakar fosil dan sistem pertanian intensif dengan pertanian organik, dan berbagai sistem seperti pertanian dengan dukungan komunitas, dimana manusia terhubung lebih dekat dengan sumber pangannya.

Apakah ciri-ciri di atas juga dapat digunakan untuk memberi ciri pada ekonomi lingkungan hidup? Apakah instrumen ekonomi lingkungan hidup yang diberikan dalam Pasal 42 dan 43 telah cukup memadai untuk mewujudkan ciri-ciri di atas?

4 Kapital Sosial, Kultur, dan Pembangunan

Hubungan antara kapital sosial dan kultur dengan pembangunan haruslah hubungan yang timbal balik, seperti halnya hubungan antara kapital dan produksi. Kapital dipakai untuk berproduksi dan dari produksi tersebut kapital diakumulasi. Beberapa elemen sosial dan kultur dapat digunakan untuk mendukung pembangunan, sebaliknya pembangunan harus memperkuat kapital sosial, termasuk kultur di dalamnya. Diakui atau tidak, pembangunan kita selama ini adalah pembangunan yang mengerikan bagi masyarakat banyak. Bukan saja sering merusak lingkungan, tetapi juga merusak ikatan sosial dan kultur masyarakat. Negara sama sekali tidak berdaya ketika tanah tempat tinggal dan mencari makan sebagian rakyatnya ditenggelamkan oleh lumpur lapindo.

Pembangunan di Indonesia jarang sekali, untuk tidak mengatakan tidak pernah, memperhatikan faktor sosial dan kultur. Bahkan pembangunan sering tanpa subyek. Kelayakan hanya dinyatakan dalam angka-angka. Perencanaan pembangunan seolah menjadi monopoli ahli ekonomi atau politik. Jarang sekali ahli sosiologi atau antropologi terlibat dalam perencanaan pembangunan. Memang benar bahwa mengintegrasikan kapital sosial dan kultur dalam pembahasan pembangunan membuat pencarian strategi dan rancangan yang sesuai menjadi lebih sulit. Tetapi sebaliknya juga sama benarnya bahwa kebijakan yang mengabaikan kapital sosial dan kultur mengalami keterbatasan yang sangat serius.

Menurut Putnam (1993), kapital sosial adalah gambaran organisasi sosial, seperti trust, norma, dan jaringan, yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan terkoordinasi. Trust bertindak sebagai elemen yang mengurangi potensi konflik dengan membatasi kecenderungan untuk mencari perselisihan. Norma adalah penting dalam mengarahkan perilaku sipil yang positif, misalnya membayar pajak bagi kesejahteraan umum. Jaringan memungkinkan terjadinya tindakan bersama, tatanan yang teratur, dan sinergisme.

Kapital sosial dan kultur dapat menjadi pengungkit pembangunan yang hebat jika kondisi yang sesuai dapat diciptakan. Pekik "MERDEKA" dapat menggelorakan semangat anak muda jaman penjajahan untuk bangkit mengusir penjajah. Sebaliknya, mengabaikan atau menghancurkan kapital sosial dan kultur menyebabkan jalan menuju pembangunan menjadi sulit. Hal ini juga sudah banyak terjadi di Indonesia. Contohnya adalah apa yang disebut dengan "mental proyek." Ketika proyek masih ada semua seolah berjalan normal. Tetapi ketika proyek berhenti, maka berhenti juga semua kegiatan yang seharusnya terus terjadi. Nilai-nilai pengorbanan

semakin terkikis dari waktu ke waktu. Demikian juga trust dalam masyarakat juga semakin meredup. Kondisi seperti ini sangat berbahaya bagi masa depan bangsa. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak membawa makna apapun bagi banyak orang.

Kapital sosial dan kultur juga merupakan sumber ide yang berkembang terus menerus. Dengan ide tersebut ekonomi dapat berkembang tanpa banyak menimbulkan entropy. Ide berperan seperti hijau daun yang dengan bantuan sinar matahari melakukan fotosintesis mengubah CO₂ dan H₂O (dua senyawa berenergi lebih rendah) menjadi gula (senyawa berenergi lebih tinggi). Dalam pembangunan ekonomi atau pembangunan pada umumnya, ide dapat merangkai barang-barang yang kurang bernilai (berenergi lebih rendah) menjadi barang yang bernilai tinggi (berenergi lebih tinggi). Sebagaimana hijau daun yang membutuhkan input makanan, kapital sosial dan kultur yang akan melahirkan ide-ide juga membutuhkan pembinaan yang terencana.

5 Realitas Lapangan

1. Tanah gambut bila mengalami proses pemampatan dan pemanasan akan berubah menjadi batubara. Mengapa emisi karbon dari tanah gambut membuat geger dunia, sedangkan emisi karbon dari batubara yang jumlahnya jutaan kali lipat dibandingkan emisi karbon dari tanah gambut tidak dipersoalkan? Adakah fenomena ini berhubungan dengan siapa yang terlibat dalam pemanfaatan tanah gambut dan batubara? Banyak masyarakat kita, khususnya dari Bugis dan Banjar, yang sangat ahli mengelola tanah gambut. Mereka sudah melakukan hal tersebut puluhan tahun tanpa masalah.
2. Penerimaan negara dari usaha pertambangan yang tergantung produksi adalah Iuran Eksplorasi/Iuran Eksploitasi/Royalti untuk Usaha Pertambangan dalam rangka Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) (lihat Lampiran PP Nomor 45 tahun 2003). Pungutan berbentuk *ad valorem*, yakni persentase dari harga jual. Kendali pemerintah dalam mengatur penerimaan dari iuran ini tergantung hanya pada tarif yang dipilih yang dinyatakan dalam persentase. Tabel 1 berikut menyajikan contoh tarif beberapa jenis bahan tambang menurut PP Nomor 45 tahun 2003.

Kecuali menghasilkan penerimaan bagi negara, royalti tambang dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan laju ekstraksi penambangan dan pada gilirannya juga kerusakan lingkungan. Tetapi atas dasar apa dan untuk mencapai tujuan apa royalti tambang disusun masih belum jelas. Apakah tarif dalam Tabel 1 telah memperhitungkan biaya lingkungan dan *scarcity rent*? Apakah tarif di atas akan menghantarkan kepada pembangunan berkelanjutan?

3. Pasal 129 ayat (1) UU 4 tahun 2009: Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi. Selanjutnya, Pasal 129 ayat (2) UU 4 tahun 2009: Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1% (satu persen); b. pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan c. pemerintah kabupaten/kota

Tabel 1: Iuran Eksplorasi/Iuran Eksploitasi/Royalty untuk Usaha Pertambangan dalam rangka Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) - Beberapa Jenis Bahan sebagai Contoh

	Uraian	Tarif (% Harga Jual)
1	Batubara (Open Pit) dengan tingkat kalori (Kkal/kg, airdried basis)	
	1. ≤ 5100	3,00%
	2. 5100-6100	5,00%
	3. >6100	7,00%
2	Batubara (Under ground) dengan tingkat kalori (Kkal/kg, airdried basis)	
	1. ≤ 5100	2,00%
	2. 5100-6100	4,00%
	3. >6100	6,00%
3	Bijih Nikel (Garnieritik)	5,00%
4	Bijih Nikel (Limonitik)	4,00%
5	Timah	3,00%
6	Tembaga	4,00%
7	Besi	3,00%
8	Emas	3,75%
9	Intan	6,50%

Sumber: Lampiran PP Nomor 45 Tahun 2003

lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen). Apakah pembagian seperti di atas, termasuk pajak yang besarnya 10%, telah mencerminkan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan?

4. Apakah eksploitasi tambang timah di Pulau Bangka berkelanjutan? Jika berkelanjutan, maka mari kita lanjutkan. Setelah mengeksploitasi tambang timah selama puluhan tahun apakah Pulau Bangka menjadi lebih kaya? Jika tidak berkelanjutan, maka mari tidak kita ulangi di tempat lain. Adakah contoh ekonomi yang dibangun dari eksploitasi sumberdaya alam tetap bertahan hingga kini setelah penambangan selesai?
5. Pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi seharusnya membuat ekonomi yang bersangkutan menjadi lebih kaya. Jika kekayaan bersih Adam lebih banyak dari kekayaan bersih Buya, maka Adam dikatakan lebih kaya daripada Buya. Anehnya, klasifikasi miskin dan tidak miskin didasarkan pada income per hari. Kekayaan adalah stock, sedangkan income adalah flow. Bagaimana jika income tersebut diperoleh dari cicilan pembayaran terhadap stock yang telah tergadai?
6. Bagaimana kita menjelaskan pertarungan yang tiada akhir di Takalar - Sulawesi Selatan antara rakyat yang butuh tanah untuk hidup melawan negara yang mencari untung dari BUMN yang memproduksi gula? Negara bersaing dengan rakyatnya sendiri yang juga sudah mampu membuat gula.
7. Mari kita lihat kasus banjir yang melibatkan wilayah hulu dengan kegiatan ekonomi yang

sangat eksploitatif - umumnya pertanian sayur - dan wilayah hilir yang sering banjir di musim penghujan. Salah satu usulan solusinya adalah masyarakat hilir memberikan insentif kepada pelaku kegiatan di hulu agar lebih memperhatikan konservasi. Ini menggunakan victim liability. Apakah pendirian kita masih sama ketika pelaku tindakan ekonomi yang sangat eksploitatif tersebut adalah industri modal besar?

6 Penutup

Saya berharap tulisan ini dapat memacu dialog yang lebih intens dan konstruktif antar disiplin ilmu dan keahlian demi mewujudkan pembangunan negara kita yang lebih adil dan berkelanjutan. Pembangunan negara ini terlalu besar untuk ditangani oleh satu atau dua disiplin ilmu atau keahlian saja.

Pustaka

- Abrams, B. A. and Lewis, K. A. 1995. Cultural and institutional determinants of economic growth: A cross-section analysis. *Public Choice*, 83(3/4):pp. 273–289.
- Adams, W. M. 2009. *Green Development: Environment and sustainability in a developing world*. Routledge, New York, 3 edition.
- Agnani, B., Gutiérrez, M.-J., and Iza, A. 2005. Growth in overlapping generation economies with non-renewable resources. *Journal of Environmental Economics and Management*, 50(2):pp. 387 – 407.
- Barro, R. J. 2001. Human capital and growth. *The American Economic Review*, 91(2):pp. 12–17. Papers and Proceedings of the Hundred Thirteenth Annual Meeting of the American Economic Association.
- Barro, R. J. and McCleary, R. M. 2003. Religion and economic growth across countries. *American Sociological Review*, 68(5):pp. 760–781.
- Beckmann, M. J. 1975. The limits to growth in a neoclassical world. *American Economic Review*, 65(4):pp. 695–99.
- Cato, M. S. 2009. *Green Economics: An Introduction to Theory, Policy and Practice*. Earthscan, London.
- Daly, H. E. 1991. Elements of environmental macroeconomics. In Costanza, R., editor, *Ecological Economics: The Science and Management of Sustainability*, chapter 3. Columbia University Press, New York.
- Domar, E. 1946. Capital expansion, rate of growth and employment. *Econometrica*, 14(2):pp. 137–147.
- England, R. W. 2000. Natural capital and the theory of economic growth. *Ecological Economics*, 34(3):pp. 425 – 431.

- Gowdy, J. M. and McDaniel, C. N. 1995. One world, one experiment: addressing the biodiversity–economics conflict. *Ecological Economics*, 15(3):pp. 181 – 192.
- Harrod, R. F. 1939. An essay in dynamic theory. *The Economic Journal*, 49(193):pp. 14–33.
- Inglehart, R. and Baker, W. E. 2000. Modernization, cultural change, and the persistence of traditional values. *American Sociological Review*, 65:pp. 19–51.
- Landes, D. S. 1999. *The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich and Some So Poor*. Norton, New York.
- Lian, B. and Oneal, J. R. 1997. Cultural diversity and economic development: A cross-national study of 98 countries, 1960-1985. *Economic Development and Cultural Change*, 46(1):pp. 61–77.
- Lucas Jr., R. E. 1990. Why doesn't capital flow from rich to poor countries? *American Economic Review*, 80(2):pp. 92–96.
- Mankiw, N. G., Romer, D., and Weil, D. N. 1992. A contribution to the empirics of economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, 107(2):pp. 407–438.
- Nafziger, E. W. 2006. *Economic Development*. Cambridge University Press, Cambridge, 4 edition.
- Putnam, R. D. 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
- Sen, A. 1988. The concept of development. In Chenery, H. and Srinivasan, T., editors, *Handbook of Economic Development*, volume 1. Elsevier Science Publishers, Amsterdam. Chapter 1.
- Smith, F. 1996. Biological diversity, ecosystem stability and economic development. *Ecological Economics*, 16:pp. 191–203.
- Solow, R. M. 1956. A contribution to the theory of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1):pp. 65–94.
- Stiglitz, J. E. 1974. Growth with exhaustible natural resources: Efficient and optimal growth paths. *Review of Economic Studies*, 41:pp. 123–138. Symposium on the Economics of Exhaustible Resources.